

## Analisis Kesesuaian Pelayanan Laboratorium dengan Standar Kepmenkes RI Nomor 1267 Tahun 2004

Dien Falah<sup>1\*</sup>, Achmad Lukman Hakim<sup>2</sup>, Nining Arini<sup>3</sup>

<sup>1-3</sup>Program Studi  
Sarjana Kesehatan  
Masyarakat, Fakultas  
Ilmu Kesehatan,  
Universitas Indonesia  
Maju

**\*Korespondensi:**

Noorita Rizkii, Program Studi  
Sarjana Kesehatan  
Masyarakat, Fakultas Ilmu  
Kesehatan, Universitas  
Indonesia Maju, Jl. Harapan  
No.50 Lenteng Agung –  
Jakarta Selatan, DKI Jakarta  
12610  
E-mail: dienfalalah@gmail.com

**DOI:**

<https://doi.org/10.70304/jm.si.v3i03.68>

Copyright © 2024, Jurnal  
Masyarakat Sehat Indonesia  
E-ISSN: 2828-1381  
P-ISSN: 2828-738X

**Abstrak:** Standarisasi pada layanan kesehatan digunakan untuk melindungi penerapan program layanan kesehatan agar bermutu, efektif dan efisien. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kesesuaian layanan laboratorium di UPTD Labkesda Kota Depok dengan Standar Kepemenkes No.1267 Tentang Standar Pelayanan Laboratorium Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota Tahun 2004. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif menggunakan teknik *purposive sampling*. Subjek penelitian yang dibutuhkan berjumlah 4 orang dan dimulai sejak bulan Oktober 2023 hingga Maret 2024. Instrumen yang digunakan adalah lembar *checklist*, pedoman wawancara, dan perekam audio. Analisis data kualitatif dilakukan dengan merangkum hasil wawancara dan analisis lembar *checklist* dideskripsikan secara persentase. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan informasi bahwa UPTD Labkesda Kota Depok memiliki persentase kesesuaian dengan standar pada masing-masing aspek meliputi ketenagaan 100%, sarana prasarana 77,78%, peralatan (teknis dasar 87,88% dan khusus 67,74%), peralatan K3 100%, pengadaan reagen 100%, kemampuan pemeriksaan laboratorium kesehatan masyarakat (secara fisika 100% dan secara kimia 77,27%), laboratorium klinik 80,92%, laboratorium biomolekuler tidak dapat terukur, dan laboratorium mikrobiologi 65,38%. Persentase kesesuaian pada aspek pemantapan mutu hasil sebesar 100%, aspek K3 100%, aspek pencatatan dan pelaporan telah sesuai dengan standar yang ditetapkan serta aspek tarif belum sesuai dengan standar. Secara keseluruhan masing-masing aspek layanan laboratorium UPTD Labkesda Kota Depok telah sesuai dengan Standar Kepemenkes Nomor 1267 Tahun 2004. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, peneliti merekomendasikan agar dilakukan peningkatan terhadap ketersediaan peralatan khusus dan pengembangan terhadap sarana penunjang laboratorium mikrobiologi serta perlu dilakukannya pelatihan penetapan tarif retribusi di lingkungan Laboratorium UPTD Labkesda Kota Depok sesuai dengan Standar Kepmenkes Nomor 1267 tahun 2004.

**Kata Kunci:** Analisis kesesuaian, Labkesda Depok, PMK 1267/2004

**Abstract:** Standardization in health services is used to protect the implementation of health service programs to be of quality, effective and efficient. The purpose of this study was to analyze the suitability of laboratory services at the UPTD Labkesda in Depok City with the Standard of the Minister of Health Decree No. 1267 concerning Laboratory Service Standards of the Regency/City Health Office in 2004. This type of research is qualitative research with a descriptive approach using a purposive sampling technique. The research subjects needed were 4 people and started from October 2023 to March 2024. The instruments used were checklist sheets, interview guidelines and audio recorders. Qualitative data analysis was carried out by summarizing the results of interviews and analysis of checklist sheets described in percentages. Based on the research results, it was obtained that the UPTD Labkesda of Depok City had a percentage of compliance with standards in each aspect including 100% manpower, 77.78% infrastructure, equipment (basic technical 87.88% and special 67.74%), K3 equipment 100%, procurement of reagents 100%, public health laboratory examination capabilities (physically 100% and chemically 77.27%), clinical laboratory 80.92%, biomolecular laboratory cannot be measured, and microbiology laboratory 65.38%. The percentage of compliance in the aspect of quality assurance of results is 100%, the K3 aspect is 100%, the recording and reporting aspect has been in accordance with the established standards and the tariff aspect has not been in accordance with the standards. Overall, each aspect of the laboratory services of the Depok City UPTD Labkesda has complied with the Standard of the Minister of Health Number 1267 of 2004. Based on the results of the study, the researcher recommends that there be an increase in the availability of special equipment and development of supporting facilities for the microbiology laboratory and that training be conducted on determining retribution rates in the Depok City UPTD Labkesda Laboratory environment in accordance with the Standard of the Minister of Health Number 1267 of 2004.

**Keywords:** Analysis of the suitability, Labkesda Depok, PMK 1267/2004

## Pendahuluan

Laboratorium dinas kesehatan kabupaten/kota adalah laboratorium kesehatan daerah (Labkesda) yang berlokasi di kabupaten/kota. Peran labkesda dalam pelayanan pembangunan kesehatan adalah sebagai Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP), berupa pencegahan dan pemberantasan penyakit, penyediaan, dan pengelolaan air bersih dan penyehatan lingkungan pemukiman serta kegiatan lain yang ada di wilayahnya<sup>(1)</sup>. Laboratorium memiliki peran strategis dalam menangani masalah kesehatan masyarakat. Malaria, diare, demam berdarah, bahkan penyakit filaria adalah penyakit menular yang masih sering terjadi dan terkadang berpotensi menjadi Kejadian Luar Biasa (KLB)<sup>(2)</sup>.

Kondisi makanan dan lingkungan yang tercemar, bahan tambahan makanan yang dilarang, dan bahan kimia berbahaya dapat menyebabkan berbagai penyakit menular. Contoh lainnya yang terjadi di depot air minum isi ulang, di mana logam berat dan bakteri masih dapat masuk. Pemerintah daerah harus memperhatikan permasalahan tersebut dengan sungguh-sungguh, agar tidak mengancam kondisi kesehatan masyarakat jika tidak diantisipasi. Dalam hal ini, pemerintah daerah dapat membuat kebijakan dengan mendukung layanan Labkesda<sup>(2)</sup>.

Saat ini jumlah laboratorium tingkat kabupaten kota di Indonesia tercatat sebanyak 234 buah. Labkesda kabupaten/kota provinsi di Jawa Barat sebanyak 26 buah dengan 1 laboratorium kesehatan provinsi, yang ke depannya seluruh provinsi yang ada di Indonesia akan ditargetkan memiliki laboratorium pemeriksaan sampai kepada pelayanan primer. Dinas kesehatan provinsi, kabupaten/kota diminta meningkatkan kapasitas labkesmas<sup>(3)</sup>. Dari jumlah labkesda yang ada, permasalahan secara umum adalah belum terintegrasinya laboratorium kesehatan secara baik dan sistematis, sarana gedung yang belum memadai, belum optimalnya surveilans penyakit dan masalah kesehatan masyarakat yang berbasis laboratorium, belum terbangunnya jejaring, belum terbinanya sumber daya laboratorium baik Sumber Daya Manusia (SDM), kalibrasi alat, dan *quality assurance*, dan terakhir sistem informasi belum terintegrasi<sup>(4)</sup>.

Pentingnya memenuhi standar ini agar dalam melakukan pemeriksaan menjadi bermutu, efektif dan efisien<sup>(1)</sup>. Selain itu, standarisasi pada layanan kesehatan digunakan dalam melindungi program layanan kesehatan pada penerapannya. Kepatuhan terhadap standar yang sudah diresmikan dapat dipergunakan untuk pengambilan keputusan dalam peningkatan dan pengembangan layanan kesehatan di bidang laboratorium sebagai tanggung jawabnya kepada masyarakat, dimana kesesuaian dengan standar menunjukkan tingkat kesempurnaan pelayanan kesehatan yang dapat menggambarkan mutu pelayanan kesehatan<sup>(5)</sup>.

UPTD Labkesda Kota Depok adalah unit pelaksana teknis dinas kesehatan Kota Depok yang berdiri pada tahun 2019 dan memiliki izin operasional pada tahun 2021 dengan wilayah kerja tingkat Kota, Depok. Jumlah unit laboratorium yang ada sebanyak empat yaitu laboratorium klinik, biomolekuler, mikrobiologi, dan kesehatan masyarakat. Sedangkan yang sudah membuka layanan bagi masyarakat baru dua unit yaitu laboratorium biomolekuler dan laboratorium klinik sebagai sumber pendapatan. Belum terdapatnya ruang laboratorium mikrobiologi di UPTD Labkesda Kota Depok berdampak pada belum dapatnya dilakukan layanan pemeriksaan mikrobiologi air dan mikrobiologi klinik. Hal ini mengakibatkan terhambatnya proses yang mendeteksi penyebab penyakit yang disebabkan oleh mikroba. Ketersediaan reagen yang merupakan parameter untuk pengujian kualitas air masih belum terpenuhi mengakibatkan kemampuan pemeriksaan kualitas air baik untuk kepentingan keamanan, pengawasan maupun perizinan usaha belum dapat terealisasi. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka peneliti perlu melakukan penelitian dengan tujuan untuk menganalisis kesesuaian layanan labkesda di UPTD Labkesda Kota Depok dengan Standar Kepemenkes No.1267 Tentang Standar Pelayanan Laboratorium Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota Tahun 2004.

## Metode

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan deskriptif untuk mendapatkan gambaran tentang bagaimana fasilitas laboratorium kesehatan dapat memenuhi standar pelayanan minimal laboratorium tingkat kota. Lokasi penelitian ini dilakukan di UPTD Labkesda Kota Depok dengan waktu penelitian dimulai pada bulan Oktober 2023 sampai Maret 2024. Dalam menentukan subjek penelitian menggunakan teknik *sampel purposive*. Empat subjek penelitian yang diperlukan untuk penelitian ini adalah informan kunci yaitu Kepala UPTD Labkesda Kota Depok dan Informan pendukung 4 orang yaitu Kepala Tata Usaha, Pengelola Kepegawaian, Pejabat Pengadaan dan Pengelola Barang dan Aset.

Data primer penelitian diperoleh dari observasi, wawancara, dan hasil lembar ceklis. Data sekunder yang diperoleh berasal dari informasi yang dikumpulkan melalui analisis dokumen seperti dokumen perencanaan, dokumen mutu, dan dokumen kepegawaian. Instrumen penelitian yang digunakan adalah lembar checklist yang menggunakan skala pengukuran *rating scale*, pedoman wawancara dan perekam audio. Peneliti menggunakan metode triangulasi sebagai metode dan sumber data untuk menguji keabsahan data. Teknik analisis data kualitatif yang dihasilkan berasal dari analisis ceklis dan wawancara yang dideskripsikan dengan cara merangkum hasil. Data hasil dibuat kesimpulan dengan cara mendeskripsikan persentase kuantitatif hasil penelitian kemudian dibandingkan atau dibagi dengan standar Kepmenkes RI No.1267 Tahun 2004 tentang Standar Pelayanan Laboratorium Dinas Kesehatan Kab/Kota untuk melihat hasil akhirnya.

## Hasil dan Pembahasan

### Analisis Ketersediaan Sarana dan Prasarana

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan informan NS2 diperoleh hasil wawancara berikut.

*“Laboratorium yang dimiliki oleh UPTD Labkesda Kota Depok hanya terdiri dari 3 unit laboratorium meski secara fungsi dan struktur organisasi terdapat 4 unit, yaitu laboratorium klinik, biomolekuler, kesehatan masyarakat dan laboratorium mikrobiologi. Unit yang belum tersedia sarannya adalah unit laboratorium mikrobiologi. Namun, secara fungsi laboratorium mikrobiologi sudah berjalan dengan jenis pemeriksaan yang tidak memerlukan suatu ruangan khusus seperti kroscek mikroba dengan mikroskop yang penanaman dan pewarnaannya dilakukan oleh fasyankes rujukan seperti kroscek malaria dari puskesmas”.*

Hasil lembar ceklis ketersediaan sarana dan prasarana laboratorium UPTD Labkesda Kota Depok dan kesesuaiannya dengan Kepmenkes Nomor 1267 Tahun 2004 didapatkan jumlah sarana prasarana yang sesuai adalah sebesar 77,78% dan dapat dilihat pada **Tabel 1**.

**Tabel 1.** Persentase Kesesuaian Sarana Prasarana UPTD Labkesda Kota Depok Tahun 2023

Sarana prasarana	Persyaratan minimal	Kepemilikan	Kesesuaian	
			Ya	Tidak
Gedung	-	420 m <sup>2</sup> , gedung permanen	√	
Tata ruang				
a. Ruang tunggu	6 m <sup>2</sup>	24 m <sup>2</sup>	√	
b. Ruang pemeriksaan/pengambilan spesimen	12 m <sup>2</sup>	9 m <sup>2</sup>	√	
c. Ruang pemeriksaan teknis masing-masing	20 m <sup>2</sup>	-		

Sarana prasarana	Persyaratan minimal	Kepemilikan	Kesesuaian	
			Ya	Tidak
Lab klinik		20 m <sup>2</sup>	√	
Lab biomolekuler		31,75 m <sup>2</sup>	√	
Lab kesmas		33,25 m <sup>2</sup>	√	
Laboratorium mikrobiologi	-	0 m <sup>2</sup>		√
a. Ruang sterilisasi media	20 m <sup>2</sup>	6,25 m <sup>2</sup>		√
b. Ruang administrasi dan pengambilan hasil	6 m <sup>2</sup>	9 m <sup>2</sup>	√	
c. Ruang cuci	4 m <sup>2</sup>	0 m <sup>2</sup>		√
d. WC petugas dan pasien @5m2	10 m <sup>2</sup>	2,25 m <sup>2</sup>		√
Penerangan/lampu	5 watt/m <sup>2</sup>	Terlampir	√	
Daya listrik	5,5 KVA	33.000 watt / 41,25 KVA	√	
Ventilasi	1/3 x luas lantai atau AC 1 PK/20 m <sup>2</sup>	Terlampir	√	
Air mengalir/bersih	50 L/karyawan/hari	-	√	
Tempat penampungan dan pengolahan limbah cair	Ada	Ada	√	
Tempat penampungan dan pengolahan limbah padat	Ada	Ada	√	
Generator	Sesuai daya listrik	-	√	
<b>Jumlah</b>			<b>14</b>	<b>4</b>
<b>% Kesesuaian</b>			<b>77,78%</b>	

### Analisis Ketersediaan Sumber Daya Manusia

Berdasarkan hasil wawancara dengan KaSubag TU (NS2) terkait ketersediaan sumber daya, diungkapkan bahwa.

*“UPTD Labkesda ini bergerak di bidang laboratorium yang awalnya hanya kesehatan perorangan saja namun berkembang menjadi pemeriksaan kesehatan masyarakat. Sehingga tenaga analisisnya pun tidak hanya analisis kesehatan melainkan analisis kimia juga ada. Keduanya minimal D3 dan untuk kegiatan operasional kami mempekerjakan tenaga administrasi yang kebanyakan latar belakangnya adalah S1, karena pencatatan pelaporan dan istilah-istilah nya cukup rumit sehingga dirasa perlu kompetensi yang lebih untuk dapat meng-cover itu. Untuk tenaga penunjang seperti petugas kebersihan, keamanan, pendidikan minimalnya adalah SMA”.*

Hasil wawancara tersebut didukung dengan data kepegawaian yang dapat dilihat dari dokumen kepegawaian dan termuat dalam aplikasi Si SDMK ketersediaan sumber daya manusia di UPTD Labkesda Kota Depok didapatkan informasi bahwa kepemilikan jenis ketenagaan telah memenuhi persyaratan minimal (100%) dapat dilihat pada **Tabel 2**.

**Tabel 2.** Persentase Kesesuaian Jenis Ketenagaan di UPTD Labkesda Kota Depok tahun 2023

Jenis Kelengkapan	Persyaratan Minimal (orang)	Kepemilikan (orang)	Kesesuaian
Sarjana kedokteran/Farmasi/Biologi/Kesehatan Masyarakat/Kimia	1	2	Sesuai
Analisis (SMAK/D3)	3	18	Sesuai
Sanitarian	1	2	Sesuai
SMA/setara	2	4	Sesuai
Tenaga lainnya	-	5	Sesuai
<b>Total</b>	<b>7</b>	<b>31</b>	
<b>% Kesesuaian</b>	<b>100%</b>		

### Analisis Ketersediaan Peralatan Laboratorium

Berdasarkan hasil wawancara terkait ketersediaan peralatan laboratorium dengan NS2 bahwa mekanisme pemenuhan peralatan laboratorium di UPTD Labkesda kota Depok adalah

*“Pemenuhan peralatan laboratorium di UPTD Labkesda Kota Depok dilakukan bertahap sesuai dengan pagu anggaran yang ada dan sesuai dengan prioritas kemudian disesuaikan dengan ketersediaan ruangan masing-masing laboratorium, dan pelaksanaannya ada yang dilakukan oleh UPTD Labkesda yaitu oleh pejabat pengadaan yang PPK-nya kepala UPTD dan ada juga yang dilakukan oleh UKPBJ. Tergantung harga dari peralatan laboratorium tersebut”.*

Kesesuaian ketersediaan jenis peralatan khusus lebih rendah dibandingkan dengan ketersediaan jenis peralatan teknis dasar dan K3, yaitu 67,74% dapat dilihat pada **Tabel 3**.

**Tabel 3.** Persentase Kesesuaian Peralatan Laboratorium UPTD Labkesda Kota Depok Tahun 2023

Jenis Peralatan	Jumlah Aspek yang Dinilai	Kesesuaian		
		Ya	Tidak	%
Teknis dasar	33	29	4	87,88
Teknis khusus	31	21	10	67,74
K3	13	13	0	100
<b>Rata-rata</b>				<b>85,21</b>

### Analisis Penetapan dan Pemilihan Reagen

Berdasarkan hasil wawancara dengan NS4 yang mengatakan bahwa.

*“...dan spesifikasinya tersebut disesuaikan kebutuhannya dan juga kalau pengadaan sendiri berdasarkan aturan di pemerintah”.*

Pernyataan ini didukung oleh analisis laboratorium sebagai informan di luar subjek penelitian dengan penuturan.

*“Dalam perencanaan kebutuhan operasional laboratorium kami memang ditanya oleh tim perencanaan apa saja yang dibutuhkan mulai dari ATK, APD, reagen, alat laboratorium, bahkan kebutuhan AC pun atas usulan kami analisis sebagai user. Terutama untuk alat dan reagen yang dipilih, karena setiap alat memiliki sensitivitas tersendiri terhadap reagen, banyaknya reagen yang dibutuhkan dan syarat penetapan reagen yang dipilih pun atas usulan dari kami sebagai user. Biasanya dalam rapat perencanaan”.*

Kesesuaian penetapan dan pemilihan reagen ini didukung oleh triangulasi data yang dapat dilihat dari dokumen sertifikat kelayakan reagen. penetapan reagen yang digunakan di UPTD Labkesda Kota Depok diperoleh informasi bahwa penetapannya disesuaikan dengan metode pemeriksaan, kebutuhan, ketersediaan di penyedia, harga, dan kelayakan edar sehingga diperoleh kesesuaian sebesar 100% dapat dilihat pada **Tabel 4**.

**Tabel 4.** Persentase Kesesuaian Penetapan dan Pemilihan Reagen UPTD Labkesda Kota Depok tahun 2023

Ketentuan	Kesesuaian	
	Ya	Tidak
Terdaftar pada ditjen pelayanan kefarmasian dan alat kesehatan depkes RI sebelum diedarkan/dijual di Indonesia.	√	
Telah dievaluasi oleh WHO Collaborating Centre dan atau telah diizinkan beredar di negara awal.	√	
Sesuai metode yang dipilih	√	

Ketentuan	Kesesuaian	
	Ya	Tidak
Jenis reagen disesuaikan dengan jumlah dan jenis pemeriksaan	√	
Memiliki keunggulan	√	
<b>Jumlah</b>	5	0
<b>% Kesesuaian</b>	100%	

### Analisis Kegiatan Pemantapan Mutu

Terkait pertanyaan perihal bagaimana UPTD labkesda Kota Depok dalam menjamin mutu/kebenaran hasil yang dikeluarkan, NS2 menjawab sebagai berikut.

*“Setiap pemeriksaan yang dilakukan oleh masing-masing laboratorium tentu dikerjakan oleh tenaga yang sesuai dengan kompetensinya. Untuk pemeriksaan lab klinik/biomol/mikro oleh analis kesehatan atau ATLM, untuk pemeriksaan air dilakukan oleh analis kimia.*

Berdasarkan hasil wawancara, pemantapan mutu dalam hal pendidikan dan pelatihan pegawai, seperti yang diungkapkan oleh NS1 bahwa *“Kami memfasilitasi pegawai untuk terus mengembangkan potensi dirinya melalui program pelatihan berkala yang memang dalam hal ini pendanaannya belum dapat dianggarkan di operasional labkesda, mekanismenya masih bersifat pengajuan ke bagian BKPSDM Kota Depok untuk setiap pelatihan yang dibutuhkan, namun untuk saat ini banyaknya pelatihan dan pengembangan kompetensi dilakukan secara daring sehingga lebih efektif dan efisien”.*

Hasil analisis kegiatan pemantapan mutu di UPTD Labkesda Kota Depok didapatkan informasi bahwa kegiatan mutu yang dilakukan adalah *quality control* internal pada awal pemeriksaan, PME ke BBLK, audit internal, verifikasi dan validasi hasil sebelum dikeluarkan ke pasien/pelanggan, pendidikan dan pelatihan baik langsung maupun *online*, dengan persen kesesuaian sebesar 100%.

**Tabel 5.** Persentase Kesesuaian Kegiatan Pemantapan Mutu UPTD Labkesda Kota Depok

Kegiatan	Kesesuaian	
	Ya	Tidak
PMI	√	
PME	√	
Verifikasi	√	
Audit internal	√	
Validasi hasil	√	
Pendidikan dan pelatihan	√	
<b>Jumlah</b>	<b>6</b>	<b>0</b>
<b>% Kesesuaian</b>	<b>100%</b>	

### Analisis Penerapan Program K3

Berdasarkan hasil wawancara, dalam pelaksanaan program K3, disampaikan oleh NS2 bahwa.

*“Penerapannya belum optimal dikarenakan belum adanya tenaga yang kompeten di bidang K3. Namun, meski demikian diupayakan seefektif mungkin paling tidak larangan makan minum di dalam lab, diwajibkannya memakai alat pelindung diri saat bekerja di lab, dan pengelolaan limbah dapat dilaksanakan”.*

Upaya penerapannya secara keseluruhan mampu dilakukan, dan didapatkan persen kesesuaian sebesar 100%.

**Tabel 6.** Persentase Kesesuaian Upaya Penerapan K3 UPTD Labkesda Kota Depok

Program	Upaya	Kesesuaian	
		Ya	Tidak
K3 yang bersifat umum	Penggunaan APD	√	
	Larangan makan dan minum di dalam ruangan laboratorium	√	
	Larangan menyimpan makanan dan minuman dalam lemari es bersama reagen.	√	
	Perlakuan spesimen sebagai bahan infeksius.	√	
K3 yang bersifat khusus	Tersedianya bulb pipet, penyimpanan bahan kimia dan reagen medis dalam tempat dan ruang yang terpisah, terdapat sistem pengelolaan limbah, tersedia lemari asam, tersedia penampungan limbah sementara baik infeksius maupun noninfeksius.	√	
<b>Jumlah</b>		<b>5</b>	<b>0</b>
<b>% Kesesuaian</b>		<b>100 %</b>	

### Analisis Kemampuan Pemeriksaan Laboratorium

Hasil analisis kemampuan pemeriksaan laboratorium didapatkan dari informasi jenis layanan yang disampaikan oleh salah satu analis sebagai triangulasi sumber data dengan penuturan sebagai berikut.

*“Untuk jenis layanan apa saja, banyak ya untuk lab klinik kita bisa periksa golongan darah, tes narkoba, kimia darah, hematologi, untuk jenis pemeriksaan secara detailnya bisa Mba ke bagian loket pendaftaran buat minta jenis layanan apa saja yang kita bisa lakukan. Ehm, Mba bisa tanya langsung atau minta leaflet atau form pemeriksaannya”.*

Kemampuan pemeriksaan laboratorium di UPTD Labkesda Kota Depok didapatkan informasi bahwa jenis pemeriksaan yang distandarkan oleh Kepmenkes RI nomor 1267 tahun 2004 berada pada jenis pemeriksaan yang dilakukan oleh unit laboratorium kesehatan masyarakat, laboratorium klinik, dan laboratorium mikrobiologi. Hasil persentase kesesuaian kemampuan pemeriksaan mikrobiologi paling rendah dibandingkan pemeriksaan laboratorium kesehatan masyarakat dan klinik.

**Tabel 7.** Persentase kesesuaian kemampuan pemeriksaan laboratorium UPTD Labkesda Kota Depok

Laboratorium	Jenis pemeriksaan	Jumlah pemeriksaan	Kemampuan pemeriksaan & kesesuaian	(%) Kesesuaian	Rata-rata (%)
Kesehatan masyarakat	Kimia lingkungan				
	• Fisika	7	7	100	88,64
Mikrobiologi	• Kimia	22	17	77,27	
	Mikrobiologi	13	4	30,77	65,38
	Patologi tinja mikroskopis	2	2	100	
Klinik	Toksikologi	9	5	55,56	80,92
	Imunologi	8	8	100	
	Patologi	14	12	85,71	
	Hematologi	10	8	80	
	Urinalisis	12	10	83,33	
<b>Rata-rata</b>					<b>78,31</b>

## Analisis Penetapan tarif Serta Kegiatan Pencatatan dan Pelaporan

Penetapan tarif yang dilakukan oleh UPTD Labkesda Kota Depok adalah metode perbandingan harga dengan laboratorium sekitar atau sejenis, seperti yang diungkapkan oleh NS2 bahwa.

*“Untuk tarif kami masih menggunakan perwal. Namun kami sedang mengusulkan tarif terbaru untuk tahun 2024. Dan memang masih menggunakan metode perbandingan harga dengan lab-lab sekitar terutama lab yang sama-sama pemerintahan. Ini memang kekurangan dari kami sehingga tidak bisa memprediksikan untung atau rugi secara pasti. Untungnya pemerintahan ini kan memang non-profit ya, dan tujuan utamanya adalah melayani masyarakat sehingga tidak terlalu dipermasalahkan. Karena jika terlalu tinggi pun harganya, akan memberatkan masyarakat. Namun, ini tetap menjadi tanggung jawab kami sebisa mungkin memberikan kontribusi kepada pendapatan pemerintah kota”.*

Hasil analisis penetapan tarif di UPTD Labkesda Kota Depok didapatkan informasi bahwa mekanisme penetapannya adalah melalui perbandingan harga.

Hasil analisis kegiatan pencatatan dan pelaporan di UPTD Labkesda Kota Depok didapatkan informasi bahwa terdapat 5 pelaporan dan sebagian besar pencatatan dilakukan secara manual belum terintegrasi secara internal namun pelaporannya sudah melalui aplikasi yang terintegrasi dengan dinas kesehatan baik kota maupun provinsi. Triangulasi data yang diperoleh dari dokumen pendukung yang didapatkan adalah laporan keuangan yang meliputi laporan penerimaan dan pengeluaran melalui aplikasi SIPKD Pemerintah kota Depok, serta realisasi fisik keuangan; laporan aset dan persediaan, melalui aplikasi ASPAK dan laporan persediaan; laporan pemeriksaan tuberkulosis, melalui aplikasi SITB (Sistem Informasi Tuberkulosis); laporan pemeriksaan SARS Cov-19, melalui aplikasi NAR dan; laporan INM (Indeks Nasional Mutu).

Sarana dan prasarana merupakan hal yang penting untuk menunjang proses pemeriksaan sehingga dapat membantu analisis untuk mengembangkan potensi diri serta mendapatkan tempat untuk melakukan eksperimen/ percobaan<sup>(6)</sup>. Berdasarkan hasil wawancara dan lembar ceklis ketersediaan sarana prasarana Laboratorium di UPTD Labkesda Kota Depok yang telah dilakukan, diketahui bahwa aspek tata ruang laboratorium yang terdapat pada UPTD Labkesda Kota Depok kurang sesuai dengan standar Kepmenkes RI nomor 1267 tahun 2004 dalam hal luas ruang pemeriksaan teknis laboratorium mikrobiologi, sterilisasi media, ruang cuci, dan WC dengan persentase kesesuaian sebesar 77,78%.

Meskipun demikian, hasil persentase kesesuaian yang didapatkan tersebut lebih besar dibandingkan dengan penelitian yang dilakukan oleh Viki pada laboratorium biologi sebagai penunjang pembelajaran biologi dengan hasil kesesuaian sarana dan prasarana yang hanya mencapai 76,6%. Berdasarkan hasil penelitian tersebut pula, hasil persentase kesesuaian yang didapatkan pada penelitian ini dapat dikategorikan ke dalam kategori baik<sup>(7)</sup>. Hasil persentase kesesuaian tersebut juga sejalan dengan apa yang tertuang pada standar Kepmenkes No 1267 tahun 2004, bahwa bangunan laboratorium Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota harus memiliki tata ruang yang baik, sesuai dengan alur pelayanan yang dilakukan dan memiliki tata ruang dalam jumlah yang cukup, sesuai dengan jenis kelengkapan yang diperlukan. Adanya ketidaksesuaian pada aspek tata ruang laboratorium mikrobiologi mungkin disebabkan karena adanya pembatalan sebagian anggaran renovasi yang dilakukan pada pertengahan tahun 2023 sehingga mempengaruhi rencana penyelesaian pembangunan.

Menurut literatur, tata ruang laboratorium mikrobiologi harus dipisah dengan laboratorium lain karena akan berpengaruh pada hasil penelitian terkait mikro tersebut dan juga dikhawatirkan adanya kontaminasi silang dengan laboratorium lainnya<sup>(8)</sup>. Berdasarkan hasil analisis ketersediaan sumber daya manusia di UPTD Labkesda Kota Depok didapatkan informasi bahwa kepemilikan jenis ketenagaan yang ada telah memenuhi persyaratan minimal dengan persentase kesesuaian sebesar 100%. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Rimavilia yang menyatakan bahwa salah satu faktor yang memengaruhi ketersediaan sumber

daya kesehatan adalah peraturan perundang-undangan khususnya mengenai standar kompetensi dan sertifikasi SDM kesehatan serta perlindungan tenaga kesehatan. Salah satu ketenagaan yang dibutuhkan berdasarkan standar Kepmenkes RI Nomor 1267 Tahun 2004 adalah analis kesehatan. Analis kesehatan tersebut diharapkan mampu memiliki kompetensi pengumpulan spesimen dan melakukan pengujian pada cairan tubuh, jaringan, dan substansi lainnya, serta mampu untuk mengoperasikan peralatan laboratorium yang telah terkomputerisasi<sup>(9)</sup>.

Jenis ketenagaan analis tidak hanya terbatas pada analis yang memiliki kompetensi kesehatan saja melainkan pula analis kimia yang dapat menunjang analisis kimia lingkungan. Selain itu juga, menurut literatur Permen PAN & RB No.1 Tahun 2020, kebutuhan pegawai di setiap instansi pemerintah wajib ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja<sup>(10)</sup>. Oleh karena itu, adanya kelebihan jumlah tenaga analis di UPTD Labkesda kota Depok yaitu sebesar 18 orang dibandingkan dengan standar Kepmenkes 1267 tahun 2007 yaitu sebesar 3 orang mungkin dikarenakan tingginya beban kerja yang harus dilakukan sehingga perlu dilakukan penyesuaian agar unit kerja mampu menunjang peningkatan pelayanan publik yang lebih baik.

Berdasarkan hasil analisis ketersediaan peralatan laboratorium di UPTD Labkesda Kota Depok, peralatan teknis dasar memiliki kesesuaian sebesar 87,88% dan peralatan teknis khusus memiliki kesesuaian sebesar 67,74%. Rendahnya persentase kesesuaian pada peralatan teknis khusus mungkin dipengaruhi oleh keterbatasan anggaran, pelaku pengadaan dan proses penyelenggaraan layanan yang bertahap. Menurut Kepemenkes 1267 Tahun 2004, standar minimal ketersediaan peralatan laboratorium terbagi dalam dua kategori, yaitu peralatan teknis dan peralatan perlengkapan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3). Peralatan teknis terbagi kembali menjadi dua kategori yaitu peralatan dasar dan peralatan khusus. Salah satu langkah yang diperlukan yang dapat diambil oleh suatu instansi adalah memilih peralatan teknis terbaik dan paling tepat untuk memenuhi kebutuhan<sup>(11)</sup>.

Menurut penelitian Aulia, dkk, kesesuaian skor peralatan pada rentang nilai 40-59% tergolong ke dalam kategori cukup. Oleh karena itu, nilai persentase kesesuaian ketersediaan peralatan teknis khusus di UPTD Labkesda Kota Depok (67,74%) dapat diasumsikan ke dalam kategori lebih dari cukup sedangkan untuk peralatan K3 telah mampu memenuhi standar minimal. Ketersediaan peralatan sangat erat kaitannya dengan tugas dan wewenang pejabat pengadaan dan bendahara pengelola barang dan aset. Pada umumnya harga peralatan yang relatif tinggi atau mahal terlebih yang masuk ke dalam kategori alat khusus. Hal ini dapat membuat regulasi proses pengadaan peralatan menjadi lebih panjang dan rumit. Pedoman pemenuhan peralatan yang berbeda antara ASPAK dan standar minimal Kepmenkes 1267 Tahun 2004 dan tidak adanya pengawasan yang berarti terhadap ketersediaan peralatan berdasarkan Kepmenkes 1267 membuat prioritas pemenuhan peralatan menjadi tidak optimal<sup>(11)</sup>.

Berdasarkan hasil analisis penetapan reagen yang digunakan di UPTD Labkesda Kota Depok diperoleh informasi bahwa penetapannya disesuaikan dengan metode pemeriksaan, kebutuhan, ketersediaan di penyedia, harga, dan kelayakan edar diperoleh persentase hasil kesesuaian sebesar 100%. Kegiatan mutu yang dilakukan adalah *quality control internal* pada awal pemeriksaan, PME ke BBLK, audit internal, verifikasi dan validasi sebelum hasil dikeluarkan ke pasien/pelanggan, pendidikan dan pelatihan baik secara langsung maupun daring diperoleh persen kesesuaian sebesar 100%. Nilai kesesuaian penerapan program K3 di UPTD Labkesda Kota Depok dengan penerapan program K3 menurut standar minimal PMK No 1267 tahun 2004 mendapatkan nilai 100%, baik untuk penerapan K3 umum maupun khusus.

Kesesuaian hasil didapat dari penerapan pemilihan reagen yang disesuaikan dengan kebutuhan berkaitan dengan sarana dan prasarana yang dimiliki. Sarana dan prasarana

berkaitan dengan penyimpanan reagen yang dapat berpengaruh pada kualitas reagen<sup>(12)</sup>. Kemudian kegiatan *quality control* yang dilakukan setiap hari sebelum pemeriksaan merupakan kegiatan Pemantauan Mutu Internal (PMI). Hal ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Wijayanti bahwa terdapat 4 variabel yang berhubungan dengan pemantapan mutu internal yaitu variabel sumber daya manusia, *quality control*, fasilitas sarana dan prasarana, dan juga standar operasional prosedur.<sup>13</sup> Kegiatan yang mencakup pendidikan dan pelatihan menjadi salah satu kegiatan pemantapan yang harus dilakukan menurut standar Kepmenkes 1267 Tahun 2004. Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa UPTD Labkesda Kota Depok melakukan pendidikan dan pelatihan baik secara tatap muka maupun secara daring<sup>(13)</sup>.

Nilai persentase kesesuaian kemampuan pemeriksaan laboratorium secara keseluruhan yaitu sebesar 78,31%. Merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh Mutiara Adilah *et al.*, pendayagunaan laboratorium dengan skor 66,6% dapat terkategori baik, 50-58,3% terkategori cukup, dan 8,3-16,6% terkategori kurang<sup>(14)</sup>. Oleh karena itu, peneliti berasumsi bahwa kemampuan pemeriksaan UPTD Labkesda Kota Depok dapat terkategori lebih dari baik atau sangat baik. Menurut Julipani, kemampuan pemeriksaan dapat menjadi salah satu faktor penilaian kepuasan pelanggan. Jika pelayanan yang diberikan dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat, maka dapat dikatakan pelayanan yang diberikan berkualitas tinggi atau memuaskan<sup>(15)</sup>.

Berdasarkan hasil analisis penetapan tarif di UPTD Labkesda Kota Depok, didapatkan informasi bahwa mekanisme penetapannya adalah melalui perbandingan harga. Berdasarkan hasil wawancara, penetapan tarif layanan di UPTD Labkesda Kota Depok pada tahun 2023 masih menggunakan Perda Kota Depok No.10 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah pada Dinas Kesehatan. Namun, cara penetapan tarif di perda tersebut belum dapat dipastikan keabsahan cara penetapan tarifnya. Hal ini dikarenakan UPTD Labkesda Kota Depok baru berdiri pada tahun 2020, sedangkan perda tarif retribusi ditetapkan pada tahun 2018 sehingga instansi belum dapat memperkirakan besaran biaya yang digunakan. Berdasarkan informasi yang didapatkan dari NS2, pada tahun 2023 Labkesda Kota Depok sedang mengusulkan tarif layanan baru berdasarkan perbandingan harga dengan laboratorium lain dan laboratorium pemerintahan sejenis yang terdapat di wilayah Kota Depok. Oleh karena itu, dapat diasumsikan bahwa penerapan tarif retribusi masih belum sesuai dengan yang distandarkan oleh PMK 1267 Tahun 2004 yaitu melalui perhitungan *unit cost*.

Berdasarkan hasil analisis kegiatan pencatatan dan pelaporan di UPTD Labkesda Kota Depok, didapatkan informasi bahwa terdapat 5 pelaporan yang pencatatannya sebagian besar secara manual dan belum terintegrasi secara internal. Namun, pelaporannya sudah dilakukan melalui aplikasi yang terintegrasi dengan dinas kesehatan baik kota maupun provinsi. Pencatatan administrasi keuangan bagi instansi pemerintah Kota Depok adalah aplikasi SIPKD. Aplikasi ini bersifat khusus atau memiliki akun tersendiri untuk masing-masing instansi yang dapat terintegrasi dengan akun Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Depok. Sementara itu, untuk pencatatan kegiatan pelayanan pemeriksaan dicatat dalam suatu buku/lembar kerja/*log book* yang menjadi dasar pelaporan kemudian akan dimasukkan ke dalam aplikasi yang tersedia ke tingkat dinas kesehatan kota, provinsi, maupun pusat. Pentingnya mencatat setiap kegiatan pelayanan dalam buku register sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati P yang menunjukkan bahwa salah satu faktor yang menghambat penggandaan rekam medis adalah kegagalan untuk mencatat setiap kegiatan pelayanan dalam buku register<sup>(16)</sup>.

## Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan masing-masing aspek layanan laboratorium UPTD Labkesda Kota Depok telah sesuai dengan

Standar Kepemenkes Nomor 1267 Tahun 2004 Berdasarkan hasil penelitian tersebut, peneliti merekomendasikan agar dilakukan peningkatan terhadap ketersediaan peralatan khusus dan pengembangan terhadap sarana penunjang laboratorium mikrobiologi serta perlu dilakukannya pelatihan penetapan tarif retribusi di lingkungan Laboratorium UPTD Labkesda Kota Depok sesuai dengan Standar Kepmenkes Nomor 1267 tahun 2004.

### **Konflik Kepentingan**

Penelitian ini tidak terikat oleh kepentingan dari individu maupun organisasi.

### **Ucapan Terimakasih**

Dalam penyusunan penelitian ini penulis banyak mendapatkan kesulitan, akan tetapi berkat bantuan dari semua pihak hal itu dapat teratasi. Peneliti ingin mengucapkan terima kasih secara khusus kepada pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dan telah memberikan pengarahan, perhatian serta nasihat yang begitu berharga dalam penyusunan awal sampai dengan selesai. Kemudian ucapan terimakasih kepada instansi yang terkait beserta staffnya dan seluruh responden terlibat yang membantu dalam proses penelitian ini

### **Persetujuan Etika Penelitian**

Penelitian ini mengenai analisis kesesuaian pelayanan laboratorium UPTD Labkesda Kota Depok tahun 2023 dengan Standar Kepmenkes RI Nomor 1267 Tahun 2004 telah melalui kajian etik dan mendapatkan izin dari Komisi Etik Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia Maju dengan nomor surat No.1037/Sket/Ka-Dept/RE/UIMA/III/2024.

### **Pendanaan**

Pendanaan selama penelitian hingga publikasi berasal dari dana peneliti pribadi

### **Daftar Pustaka**

1. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Indonesia. Kepmenkes No.1267 Tahun 2004 tentang Standar Pelayanan Laboratorium Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia; 2007.
2. Dinas Kesehatan Kota Depok. Profil Kesehatan Kota Depok Tahun 2022. 1st ed. Depok: Dinkes Kota Depok; 2023.
3. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat. Disk Jabarprov. 2022;52.
4. Ditjen Kesmas Kementerian Kesehatan. Masa Depan Laboratorium Kesehatan Milik Pemerintah Paska Pandemi dan Transformasi Sistem Kesehatan. Jakarta: kementerian Kesehatan Republik Indonesia; 2023.
5. Khaira M, Fakultas EU, Keperawatan I, Kesehatan D, Khaira El-Umammi M, Santosa B, et al. Kepatuhan Petugas Laboratorium Dalam Penerapan Quality Control Dengan Hasil Mutu Pemeriksaan Laboratorium Di Rsud Aji Muhammad Parikesit Tenggarong. 2016;1-5.
6. Winda M, Muharini R, Rasmawan R. Pengembangan Ensiklopedia Peralatan Laboratorium Kimia. J Pendidik dan Pembelajaran Khatulistiwa. 2020;9(4):1-8.
7. Munsifa VI. Analisis Kesesuaian Sarana Dan Prasarana Laboratorium Biologi Sebagai Penunjang Pembelajaran. Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember; 2022.
8. Ramdhani MN, Supriyatna A. Identifikasi Tata Ruang dan Pengenalan Alat-Alat Di Laboratorium Mikrobiologi. J Penelit Teknol Inf dan Sains. 2023;1(2):41-9.
9. Hafidz M Al, Effendi PM. Aplikasi Penentuan Kebutuhan Pelatihan Berbasis Kompetensi Untuk Peningkatan Kinerja Staf Analis Laboratorium. Teknika. 2023;12(2):129-37.
10. Permenpan. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan. Jakarta: Permenpan; 2020. 1-46 p.
11. Aulia AF, Sutabri T, Sarjana PP, Studi P, Informatika T, Darma UB, et al. Analisis Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Peralatan Teknis Menggunakan Metode Analytical Hierarchy Proccess 1,2. :1143-54.
12. Delfiana RS, Harlita TD, Hartono AR. Pengaruh Penyimpanan Reagen Kerja Terhadap Aktivitas Enzim Alanine Aminotransferase. J Indones Med Lab Sci. 2023;4(2):125-35.
13. Hani Nur Wijayanti, Aturut Yansen, Ois Nurcahyanti. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi

- Pemantapan Mutu Internal Pada Pemeriksaan Urin Rutin Di Laboratorium Rsud Kota Depok. *Binawan Student J.* 2022;4(1):38–42.
14. Adilah M, Setiadi AE, Kahar AP. Analisis Standarisasi Laboratorium Biologi Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kota Pontianak (The Analysis of Standardization of Biology Laboratory at Senior High School in Pontianak). *J Ilm Didakt Media Ilm Pendidik dan Pengajaran.* 2021;21(2):195.
  15. Julipani SN, Syafitri ZA. Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pelanggan di UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi Jawa Barat. *J Pendidik Dan Kewirausahaan.* 2021;9(2):486–92.
  16. Kementerian Kesehatan. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis. Jakarta: Kemenkes RI; 2022.